



Pengusiran KPU DKI Kian Mepet

Belum Ada Kesepakatan Tempat Pengganti

RENTANG waktu yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk segera henggang dari kantor di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, hampir habis. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hanya memberikan waktu 30 hari.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengaku belum memutuskan pemindahan kantor ke lokasi pengganti di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sebab kantor sementara yang diberikan Pemprov DKI Jakarta itu terbilang tak strategis.

Bahkan dinilai akan mempersulit kinerja KPU DKI Jakarta saat melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. "Kami masih keberatan karena tempat yang diberikan sangat jauh, aksesnya juga susah. Tentu tidak strategis jika kantor KPU DKI berada di pinggiran Jakarta, meski hanya tempat sementara," ujar Sumarno, kemarin (10/8).

Dia mengungkapkan, sulitnya akses akan menghambat proses tahapan pilgub nanti. Ia juga mengaku telah meminta lokasi alternatif lainnya kepada Pemprov DKI. Permintaan itu telah diketahui oleh komisi A DPRD DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede.

"Kami ditawarkan sebuah gedung di Jalan Salemba Raya. Gedung itu sekarang ditempati oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Gedungnya kami lihat representatif dan mudah aksesnya. Namun sampai sekarang, gedung itu masih ditempati. Jadi kami harus terus berkoordinasi," terang Sumarno.

Sementara itu, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengaku belum akan melakukan pengosongan gedung KPU DKI. Namun begitu, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti Satpol PP dan Dinas terkait lainnya. "Belum ada tindakan, kami masih terus koordinasi," terang dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah berulang kali bertemu komisioner KPU DKI Jakarta. Kedua belah pihak juga sepakat atas penempatan sementara KPU DKI di Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara.

Karena itu, ia menengarai adanya 'permainan politik' antara komisi A DPRD dan KPU DKI Jakarta. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI telah berkirin surat kepada KPU DKI untuk segera mengosongkan kantor yang terletak di Gambir tersebut. "Mungkin ada yang mau bermain politik terkait persoalan ini," tukas dia. (**wok**)

KISRUH pemindahan kantor KPU DKI Jakarta, disayangkan sejumlah pihak. Seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) DKI Jakarta yang menyesalkan adanya kisruh pemindahan gedung jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

"KIPP DKI sangat menyayangkan hal itu. Sebab bisa berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Apalagi kalau nantinya KPU DKI dipaksa untuk berkantor di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sedangkan mereka sendiri inginnya berkantor di kawasan Jakarta Pusat," ujar Ketua KIPP DKI Willi Sumarlin kepada INDOPOS, kemarin (10/8).

Menurut Willi, KPU DKI semestinya berkantor di kawasan strategis. Sebab dalam penyelenggaraan Pilgub 2017, dibutuhkan kordinasi yang cepat. "Jangan malah di pinggirkan," tandas dia.

Kordinasi cepat dimaksud, sambung Willi, seperti membahas persoalan tahapan pilgub dengan parpol peserta pemilu dan stakeholder terkait. Serta persiapan keamanan. "Kalau jauh, nantinya susah lagi kalau ada hal-hal penting yang harus dibahas bersama," kata dia.

Willi berharap, kisruh pemindahan kantor KPU DKI tidak berimbas kepada program dan anggaran yang nantinya akan diberikan. (**dai**)

DEADLINE PENGGUNAAN KANTOR KPU DKI JAKARTA

- ✓ Pemprov DKI kirim surat pada 15 Juli 2015
- ✓ Bila tak dipatuhi, akan dikosongkan secara paksa

SIKAP KPU DKI JAKARTA

Desak lokasi pengganti yang berada di tengah kota

PENDAPAT GUBERNUR AHOK

Mungkin ada yang mau bermain politik terkait persoalan itu